

PENGUATAN WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA MELALUI PPKN DI ERA DISRUPSI

Esty Rahmayanti

Dosen PPKn Institut Seni Indonesia Surakarta

Pos el: estyrahmayanti@gmail.com

ABSTRAK

Era disrupsi merupakan era baru yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat melampaui cara-cara klasik yang sudah tidak relevan dengan gaya hidup sekarang. Penguatan kompetensi wawasan global menjadi penting yaitu untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi kewargaan digital (*digital citizenship*) yang lahir karena proses globalisasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun dan menguatkan wawasan global warga negara, kompetensi wawasan global yang meliputi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* sebagai warga negara global dibangun dan dikuatkan agar warga negara memiliki kemampuan menanggapi dan memfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam termasuk di dalamnya berbagai elemen dalam konteks global, namun tetap memegang teguh jati diri bangsa dengan selalu berusaha untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dalam menunjukkan karakter baik yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Kata kunci : wawasan global, PPKn, era disrupsi.

PENDAHULUAN

Era disrupsi adalah masa ketika perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena pergerakan dunia yang tidak lagi berjalan linear. Tataan baru hadir menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif dan masif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia usaha, perbankan, transportasi, sosial kemasyarakatan, pendidikan hingga politik. Oleh sebab itu era ini melahirkan dua pilihan penting: berubah atau punah.

Revolusi industri 4.0 meliputi tiga hal. Pertama, *velocity* atau kecepatan suatu perkembangan bergerak secara eksponensial tidak linier. Kedua, *breadth and depth* atau lebar dan mendalam, dalam arti revolusi digital dan perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ranah ekonomi, bisnis, masyarakat, dan individu. Hal ini tidak hanya mengubah tentang apa dan bagaimana melakukan sesuatu, tetapi

juga tentang siapa kita. Ketiga, *systems impact* atau dampak sistem. Hal ini melibatkan transformasi dalam seluruh sistem, yang melintasi negara, perusahaan, industri dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat selain menghasilkan sisi positif seperti memberi kemudahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat, juga ditengarai menelorkan hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era global abad ke-21 telah mengubah dunia begitu cepat. Perubahan-perubahan itu telah memunculkan berbagai permasalahan yang tidak hanya dialami oleh satu negara, tetapi juga menjadi masalah lintas negara. Penelitian Karsten dkk (1998) menemukan setidaknya ada 19 kecenderungan global yang perlu diantisipasi oleh setiap negara. Tujuh di antaranya diidentifikasi sebagai kecenderungan yang tidak diinginkan, tapi sangat mungkin akan terjadi. Kewarganegaraan berkembang menjadi kewarganegaraan global (*global citizenship*) yang dapat dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang bergantung pada saling keterkaitan antara dimensi tanggungjawab sosial, kompetensi global, dan keterlibatan warga negara secara global (Morais dan Ogden, 2011).

Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang dalam prosesnya terus bergerak begitu cepat dan massif. Dengan demikian pembentukan warga negara berwawasan global (*global citizen*) mutlak diperlukan. Noddings (Rapoport, 2008) mengatakan bahwa “*a global citizen is one who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life*”. Dari paparan di atas penekanannya ada pada eksistensi warga negara dalam konteks kehidupan global. Pendidikan global (*global education*) sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut. Gagasan tersebut dapat memperkuat PPKn untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan warga negara menjadi warga dunia (*global citizen*) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini (Komalasari, 2009).

Proses pembelajaran PPKn dalam koridor *value based education* sudah selayaknya membangun kompetensi kewargaan digital. Warga negara yang siap dengan dunia digital. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. PPKn tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Osler dan Starkey (Bourke dkk, 2012) mengemukakan bahwa PPKn mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang dewasa dan bertanggung jawab.

Pembelajaran PPKn hendaknya dapat membentuk warga negara yang memiliki kemampuan untuk memasuki abad baru yang mampu menanggapi dan memfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam termasuk di dalamnya berbagai elemen dalam konteks global, namun tetap memegang teguh jati diri bangsa dengan selalu berusaha untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dalam menunjukkan karakter baik yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Masalah dan Tantangan Era Disrupsi

Era disrupsi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 memberikan dampak positif maupun negatif terhadap manusia. Akibat berkembangnya teknologi, terutama perkembangan robotika dan kecerdasan buatan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, dampak negatifnya adalah penyalahgunaan teknologi tersebut untuk kepentingan individu atau kelompok yang kadang tidak sejalan dengan etika dan norma masyarakat. Sebagaimana digambarkan oleh Klaus Schwab (2017) era disrupsi merupakan era penuh tantangan. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh gangguan terhadap keamanan dan pembentukan kembali sistem produksi, konsumsi, transportasi, dan sistem pengantaran. Sekarang juga telah terjadi perubahan paradigma tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mengekspresikan sesuatu, dan bagaimana kita memperoleh informasi. Dengan cara yang sama, pemerintah dan institusinya dibangun kembali, diantaranya adalah sistem pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan transportasi.

Disrupsi menginisiasi lahirnya berbagai perubahan yang cukup signifikan merubah pola kehidupan masyarakat. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Menurut Kasali (2017), disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini (*today change*) tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok (*the future change*). Oleh karena itu, era disrupsi menuntut kita untuk mampu mengimbangi perubahan yang ada hari ini dan juga perubahan yang akan datang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di era disrupsi ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan hampir terjadi disebagian besar generasi muda. Era disrupsi yang juga sering disebut era digitalisasi telah berhasil membentuk polarisasi di masyarakat sehingga masyarakat menjadi terpolarisasi yang cukup berbahaya terhadap keselamatan integrasi bangsa.

Era Disrupsi sebenarnya berkaitan dengan perubahan konsep dalam dunia teknologi yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab Ekonom terkenal asal Jerman itu menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Revolusi industri yang pertama era 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan ditemukannya alat

tenun mekanis pertama pada 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang menganggur tapi produksi diyakini berlipat ganda.

Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Sistem yang seperti ini pada waktu itu sangat membantu bagi beberapa perusahaan lebih efektif dalam melakukan pengelolaan pekerjaan. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical*. Saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things*. Dari pemahaman konsep revolusi industri itulah seluruh sektor kehidupan wajib menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Revolusi zaman 4.0 kerap dinamakan era disrupsi. Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui media audio (radio) dan audio visual (televise, internet, dan lain-lain). Fenomena modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini populer dengan sebutan globalisasi.

Pengertian Wawasan Global

Wawasan adalah suatu pandangan ataupun sikap yang mendalam terhadap suatu hakekat, sedangkan global dapat diartikan mendunia. Jadi wawasan global adalah pandangan atau sikap yang mendunia.

Ubaedillah, (2008) berpendapat bahwa:

Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.

Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering diidentikkan dengan: (1) Internasionalisasi, yaitu hubungan antarnegara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal; (2) Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan izin masuk suatu negara (visa); (3) Universalisasi, yaitu ragam selera dan gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia; (4) Westernisasi atau Amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika; (5) de-Territorialisasi, yaitu perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah.

Beberapa ciri-ciri kehidupan masyarakat pada era global, antara lain:

(Tilaar, 2002:2-3)

1. Kemajuan Ilmu Teknologi

Kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi begitu pesat. Utamanya, teknologi komunikasi yang telah menolong penyebaran ilmu pengetahuan dan selanjutnya pengembangan serta pemanfaatannya untuk peningkatan mutu kehidupan manusia. Dalam hal ini, kemajuan teknologi komunikasi telah membantu umat manusia untuk mengenal ilmu pengetahuan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak, lebih *up-to-date*.

2. Dunia-Tanpa-Batas (*Borderless World*)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi mengakibatkan sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna, dan dunia seakan-akan menjadi satu. Dengan demikian komunikasi antarmanusia, hubungan antar-manusia, masyarakat, dan bangsa menjadi transparan (tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi). Perdagangan dunia, ekonomi dunia, tidak dibatasi lagi oleh perusahaan-perusahaan domestic tetapi oleh perusahaan multi-nasional yang tanpa mengenal negara.

3. Kesadaran terhadap HAM serta Kewajiban Asasi Manusia (*Human Rights and Obligations*)

Rontoknya ideologi komunis serta ideologi otoriter lainnya telah menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat manusia sebagai sesuatu yang harus dihormati. Hak-hak manusia di mana pun di dunia ini adalah sama yaitu hak untuk hidup dan untuk dihidupi. Sejalan dengan itu pula manusia wajib mempunyai tanggung jawab untuk memelihara masyarakat yang bebas dari ketakutan, bebas dari paksaan, dan bebas untuk mewujudkan hakikat hidupnya sendiri dengan memperhatikan kepentingan hidup bersama.

4. Masyarakat Mega-kompetisi

Suatu bangsa tidak dapat hidup terisolasi tanpa kerjasama dengan bangsa yang lain. Dan di dalam hidup bersama memberikan setiap individu, setiap kelompok, maka akan terjadi kompetisi yang sehat antarmasyarakat, antar-bangsa. Dengan demikian, manusia era global mempunyai kesempatan untuk berkembang sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada padanya. Kesempatan untuk berkembang akan memungkinkan seseorang atau sekelompok masyarakat atau bangsa untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi dirinya, bagi masyarakatnya, dan bagi umat manusia. Dengan kompetisi yang terbuka dan sehat ini maka taraf hidup manusia diharapkan akan semakin meningkat.

Shaw pasca-militerisme adalah analisis Shaw mengenai hubungan antara negara global (perkembangan pemerintah global) dan suatu masyarakat sipil global. Konsep pasca-militerisme dibagi dalam dua segi. Pertama, ia bukan berarti berakhirnya ancaman militer, melainkan membawa kesadaran bahwa isu-isu keamanan yang sekarang dihadapi oleh

negara-negara bukanlah bersifat kementerian secara langsung, melainkan melibatkan isu-isu antarbangsa seperti ketidakadilan, migrasi, dan kerusakan lingkungan. Kedua, suatu masyarakat pasca-militer adalah masyarakat di mana warga negara dilepaskan dari hubungan dekatnya dengan tugas kemiliteran. Dengan meningkatnya sifat teknologi sistem persenjataan, pengerahan massal pasukan wajib militer cenderung bukan merupakan gambaran konflik senjata di masa depan. Kedua aspek pasca-militer ini memungkinkan setidaknya kemungkinan memutus kaitan antara kewarganegaraan dan negara, dan memupuk sebuah etika tanggung jawab global untuk menghadapi tantangan yang disodorkan oleh ancaman-ancaman global (Faulks, 2010:308).

Pendidikan yang berperspektif global adalah suatu pendidikan yang harus menekankan pada metode belajar yang mendekatkan peserta didik pada “dunia secara utuh”, keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain yang saling memengaruhi antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat (Soyomukti, 2008:53).

Peran PPKn dalam Memperkuat Kompetensi Wawasan Global Warga Negara

Pada dasarnya kompetensi wawasan global warga negara yang dibentuk adalah dalam kajian bagaimana warga negara memandang bahwa dalam berhubungan antar warga negara tidak hanya dalam bagian negaranya saja tetapi memandang secara keseluruhan dari bagian dunia. Kompetensi wawasan global warga negara melalui PPKn targetnya adalah pembentukan warga negara yang cerdas (*an informed citizenry*), warga negara yang mampu berpikir analitis (*analytical citizenry*), dan warga negara yang memiliki komitmen dan mampu melibatkan diri (*a committed and involved citizenry*) (Wahab & Sapriya, 2011).

Kompetensi wawasan global secara lebih lanjut sejalan dengan pemikiran warga negara yang diperlukan pada abad ke-21 sebagaimana dikemukakan oleh Cogan (1998) yang menjelaskan tentang delapan karakteristik yang merupakan ciri-ciri, keterampilan, dan kompetensi tertentu pada warga negara yang hidup di abad ke-21. Karakteristik tersebut diperlukan untuk mengatasi dan mengelola gejala yang tidak diinginkan. Delapan karakteristik itu adalah:

1. *The ability to look at and approach problem as a member of global society*
2. *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules/duties with society*
3. *The ability to understand, accept, appreciate, and tolerate cultural differences.*

4. *The capacity to think in a critical and systematic way.*
5. *The willingness to resolve conflict in a non violent manner.*
6. *The willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment.*
7. *The ability to be sensitive toward and to defend human right (eg. Right of woman, ethnic minorities)*
8. *The willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels.*

Kompetensi wawasan global warga negara tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan tiga kompetensi utama yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn yakni berkaitan dengan pengetahuan kewargaan, keterampilan kewargaan, bahkan sampai pembentukan sikap atau karakter kewargaan. Penguatan kompetensi wawasan global melalui PPKn hadir dalam upaya membentuk warga negara yang dapat berpikir multidimensional.

Berdasarkan pendapat Branson (1998) mengenai kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Berikut pemaparannya:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Knowledge of Citizenship and Government In Democracy (Civic Knowledge) : a) Concepts/principles on the substance of democracy, b) Issues about the meaning and implementation of core ideas, c) Constitutions and institutions of representative democratic government, d) Organization and functions of democratic institutions, e) Practices of democratic citizenship and the roles of citizens, f) Contexts of democracy: cultural, social, political, and economic, g) History of democracy in particular states and throughout the world (Patrick & Vontz, 2011: 41).

Seorang warga negara yang ideal demokratis seyogyanya tampil sebagai “*Informed and reasoned decision maker*” atau pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperlukan *knowledge* atau pengetahuan atau wawasan, *beliefs: civic virtues* atau kepercayaan berupa kebajikan warganegara, dan *skills: civic participation* yakni keterampilan partisipasi sebagai warga negara. Saling penetrasi antara ketiga kluster kemampuan tersebut akan menghasilkan tumbuhnya individu warganegara yang *competent* atau berkemampuan, *confident* berkeyakinan diri, dan *commitment* atau kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri.

Untuk masing-masing klaster kemampuan tersebut kemudian dirinci sebagai berikut (CCE: 1999).

1) *Knowledge: The Content of Civic Education:*

a) *Why do we need a government?*

b) *The purpose of government*

c) *Constitutional principles*

d) *Structure of government*

e) *Concepts, principles, and values underlying the political system, authority, justice, diversity, rule of law*

f) *Individual rights (personal, political, economic)*

g) *Responsibilities of citizen*

h) *Role of citizen in a democracy*

i) *How the citizen can participate in community decision.*

2) *Skills: What a citizen needs to be able to do to participate effectively*

a) *Critical thinking skills: gather and assess information, clarify and prioritize, identify and assess consequences, evaluate, reflect*

b) *Participation skills: communicate, negotiate, cooperate, manage conflicts peacefully and fairly, reach consensus*

1) *Attitudes/Beliefs: character of disposition of citizen*

a) *Personal character: moral responsibility, self discipline, respect for individual dignity and diversity of opinion (empathy)*

b) *Public character: respect for the law, willingness to participate in public affairs, commitment to the rule of the majority with respect for the rights of the minority, commitment to the balance between self-interest and the common welfare, willingness to seek changes in unjust laws in a peaceful and legal manner*

2) *Civic disposition:*

Civility, respect for the rights of other individuals, respect for law, honesty, open mindedness, critical mindedness, negotiation and compromise, persistence, compassion, patriotism, courage, tolerance of ambiguity. (CEE:1999).

Dilihat dari tujuan, isi, proses pembelajaran, serta keseluruhan kriteria *effective civic education* yang dikembangkan oleh CCE tersebut, tampak bahwa *civic education* sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem pembelajaran didasarkan pada paradigma pendidikan yang bertolak dari, dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada perwujudan cita-cita, nilai, prinsip, dan praksis demokrasi konstitusional negara yang bersangkutan, dengan menitikberatkan pada pengembangan warga negara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (*competent, confident, commitment*).

2. Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*)

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (*keterampilan partisipasi*). Keterampilan intelektual yang terpenting

bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab (Bahmueller, 1997: 39).

Participatory skills of citizenship in a democracy (participatory civic skills) : a) Interacting with other citizens to promote personal and common interests, b) Monitoring public events and issues, c) Deliberating and making decisions about public policy issues, d) Influencing policy decisions on public issues, e) Implementing policy decision on public issues, f) Taking action to improve political/civic life (Patrick & Vontz, 2011: 41).

Dimensi *civic skills* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan untuk berperan secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran secara aktif warga negara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan pengetahuan tentang konsep yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini secara kontekstual dan kecenderungan untuk bertindak sesuai watak dari warga negara (Bahmueller, 1997: 39).

3. Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. secara konseptual, *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: *Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self discipline, and civic mindedness, open mindedness (openness, scepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles)* (Quigley, 1991: 13-14).

Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup ketrebukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi dan keragaman, kesabaran dan keajegan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

Sedangkan menurut Patrick & Vontz (2011: 41)

Civic Disposition : a) Promoting the common good, b) Affirming the common and equal humanity and dignity of each person, c) Respecting, protecting, and using rights possessed equally by each person, d) Participating responsibly in the political/civic life of the community, e) Respecting, protecting, and practicing government by consent of the people, f) Supporting and practicing civic virtues.

Civic disposition meliputi a) Mempromosikan hal yang baik, b) Mengakui nilai kemanusiaan dan martabat setiap orang, c) Menghormati, melindungi, dan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, d) Berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik/ bermasyarakat, e) Menghormati, melindungi, dan mempraktekkan pemerintah dengan persetujuan rakyat, f) Mendukung dan mempraktekkan kebajikan masyarakat.

Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Udin S. Winataputra, 2007: 191-192).

Tentang kaitan antara ketiga substansi PPKn tersebut digambarkan sebagai berikut. *Habits of the hearts”, as Alexis de Tocqueville called civic dispositions, are necessarily intertwined with civic knowledge and civic skills component of democratic citizenship. Education for democratic citizenship requires the development of those traits of public private character that compel citizens to exercise the rights and responsibilities of democratic citizenship and promote the common good* (Patrick & Vontz, 2011: 53).

Alexis de Tocqueville yang menyebut karakter kewarganegaraan harus saling terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan untuk membentuk warga negara yang demokratis memerlukan pengembangan sifat-sifat karakter publik dan pribadi yang mengharuskan warga negara untuk menggunakan hak dan tanggungjawab kewarganegaraan demokratis dan mempromosikan kebaikan bersama.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa watak kewarganegaraan adalah *output* dari proses pembelajaran PPKn setelah peserta didik memperoleh pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan, sehingga terwujud watak atau karakter kewarganegaraan.

Kompetensi sikap wawasan global warga negara berkaitan dengan beberapa hal terutama berkaitan dengan pembentukan perspektif global sebagaimana dikemukakan oleh Diaz, Massialas Xanthopoulos dalam bukunya “*Global perspective for educator*” (Wahab dan Sapriya, 2008) mengemukakan bahwa “*we also develop sensitivities towards our fellow global citizens, trying to understand them and empathise with them*”. Hal ini menjelaskan bahwa warga global dalam konteks perlunya afinitas dan empati dalam menghadapi isu-isu global, lebih tepatnya apabila dimaknai dalam dimensi afektif, sehingga konsep kompetensi sikap wawasan global warga negara sangat erat kaitannya dengan proses untuk kesiapan bertindak laku dalam menghadapi isu-isu global.

Ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut kemudian diintegrasikan dengan karakteristik warga negara di era global menurut Cogan dan Derricot (2008) yang meliputi:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global

2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya didalam masyarakat
3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan budaya
4. Kapasitas berpikir dengan cara kritis dan sistematis
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan
7. Kemampuan bersikap sensitive dan melindungi hak asasi manusia
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat local, nasional, dan internasional.

Pengembangan kompetensi wawasan global warga negara dalam tiga ranah ini menjadi elemen yang kuat guna pembentukan warga negara yang baik sebagai tujuan dari pembelajaran PPKn. Keanggotaan masyarakat Indonesia yang mulai mendunia dan semakin kompleks menjadi salah satu yang dihadapi dalam kecenderungan global sehingga diperlukan konsep pendidikan yang mampu menyiapkan warga negara untuk memahami serta menerima perbedaan-perbedaan budaya dengan cara yang kooperatif, masalah-masalah yang muncul di kehidupan globalisasi ini diperlukan pemikiran-pemikiran yang kritis dan sistematis dalam menanganinya.

Simpulan

Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang terus bergerak begitu cepat dan massif, oleh karena itu pembentukan dan penguatan warga negara yang berwawasan global (*global citizen*) mutlak diperlukan. Pendidikan global (*global education*) melalui PPKn sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut.

Tiga kompetensi utama wawasan global warga negara, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan diperlukan dalam rangka menghadapi dan menjalani era digital. Gagasan tersebut dapat memperkuat ilmu pengetahuan sosial termasuk di dalamnya PPKn untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia (*global citizen*) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini.

Daftar Rujukan

Bourke, L., Bamber, P., dan Lyons, M. 2012. "Global Citizens: Who Are They?", dalam *Education, Citizenship and Social Justice*, 7 (2), hlm. 161-174.

Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*.

London: Kogan Page Limited. Hlm.

Karsten, S., et al. 1998. "Challenges Facing The 21st Century Citizen: Views of Policy Makers", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited. Hlm.

Kasali, Rhenald. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kokom Komalasari (2009). *The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students Civic Competence*. Journal of Social Sciences 5 (4): 261-270, 2009.

Morais, D.B. dan Ogden, A.C. 2011. Initial Development and Validation of The Global Citizenship Scale, dalam *Journal of Studies in International Education*, 15

Patrick, J.J., Vontz, T.S & Metcalf (2011). *Project Citizen and The Civic Development of Adolescent Student in Indiana, Latvia, and Lithuania*. Wahington, DC: ERIC Publication.

(5), hlm. 445-446.

Rapoport, A. (2008). A Forgotten Concept: Global Citizenship Education and State Social Studies Standards. *The Journal of Social Studies Research*, 33(I), 91112.

Schwab, Klaus. 2017. *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Businnes.

Tilaar, H.A.R (2002). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ubaidillah Abdul Rozak (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCIE UIN Syarif Hidayatullah.

Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

